



Pemetaan Profil Sosial Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus di 12 Kecamatan, Kabupaten Batubara)

Dara Aisyah¹, Februati Trimurni², M. Deny Effendy Tambusay³

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Corresponding Author: daisyah@usu.ac.id

INFO PASAL

Log Artikel:

Received: 05 Mei 2025

Revised: 17 Mei 2025

Accepted: 09 Juni 2025

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:XXX

P-ISSN:XXX

Kutipan:

Aisyah.D, Trimurni.F, Tambusay.M.D.E., (2025). Pemetaan Profil Sosial Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus di 12 Kecamatan, Kabupaten Batubara), 3(1).

ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki sekitar 66 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu menyerap 117 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional. Namun, di balik kontribusi ini terdapat tren penurunan produktivitas sektor UMKM, terbukti dari menurunnya jumlah UMKM yang terdaftar secara nasional. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan program pemerintah dalam menjawab kebutuhan sektor UMKM. Pemetaan terhadap sektor ini sering kali tidak berbasis data empiris yang akurat, sehingga menghambat upaya pengembangan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan profil sosial ekonomi UMKM di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, melalui pendekatan multidimensional terhadap enam indikator utama: skala usaha, jenis usaha, perizinan, struktur sumber daya manusia, sistem pemasaran, dan bentuk intervensi kelembagaan. Studi ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), dengan pengumpulan data melalui survei lapangan, observasi langsung, dan wawancara mendalam di dua belas kecamatan pesisir Batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih berada pada skala mikro, dengan dominasi pada sektor makanan dan minuman berbasis lokal. Rendahnya adopsi teknologi digital dalam sistem pemasaran produk, ditambah dengan sebagian besar pelaku UMKM yang masih mengelola usaha secara informal tanpa adanya nomor izin usaha, mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan sektor UMKM. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan berbasis bukti untuk pengembangan UMKM sebagai fondasi kemandirian ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemetaan, Profil Sosial Ekonomi, UMKM

ABSTRACT

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2023, Indonesia has approximately 66 million Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that employ 117 million workers and contribute around 61% to the national GDP. However, behind this contribution, there is a declining trend in the productivity of the MSME sector, as evidenced by the decreasing number of MSMEs registered nationally. This decline is largely due to the failure of government programs to address the needs of the MSME sector. Mapping of this sector is often not based on accurate empirical data, thus hindering more effective development efforts. This study aims to map the socio-economic profile of MSMEs in Batubara Regency, North Sumatra, through a multidimensional approach to six key indicators: business scale, type of business, licensing, human resource structure, marketing system, and institutional intervention forms. The study uses a mixed-methods approach, with data collection through field surveys, direct observation, and in-depth interviews in twelve coastal sub-districts of



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

Batubara. The results show that the majority of MSMEs are still at the micro scale, with a dominance in the local-based food and beverage sector. The low adoption of digital technology in the product marketing system, combined with the fact that most MSME actors still manage businesses informally without a business license number, results in stagnation in the development of the MSME sector. These findings have significant implications for the formulation of evidence-based policies for MSME development as the foundation of resilient, inclusive, and sustainable local economic independence.

Keywords: Mapping, Socio-Economic Profile, MSMEs.

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional (Maksum et al., 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta unit UMKM di Indonesia, menyerap 117 juta tenaga kerja dan menyumbang sekitar 61 % terhadap PDB nasional (Bhakti, 2025). Namun, di tengah pasang surut arus dinamika yang ada, terdapat potensi kemunduran sektor ini yang harus menjadi perhatian serius (Hapsari et al., 2024). Data dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren penurunan jumlah UMKM secara nasional, yakni dari 66 juta unit menjadi sekitar 64–65 juta unit (Juanda et al., 2023). Penurunan ini harus dipandang sebagai peringatan awal (*early warning sign*) bahwa sektor UMKM merupakan sektor rentan terutama terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan teknologi, serta ketidakpastian regulasi dan akses pasar, sehingga penguatan terhadap sektor ini menjadi sangat penting (Utami et al., 2024).

Pemerintah melalui program *Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM* (PL-KUMKM) 2023 telah menginisiasi pembangunan basis data tunggal (*single source of truth*) yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan guna memperkuat ketahanan dan mendorong pengembangan sektor UMKM secara berkelanjutan. Namun, implementasi program di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelaksanaan yang bersifat parsial, ketidaktepatan sasaran bantuan, dan rendahnya integrasi data dengan karakteristik sektoral UMKM. Kondisi ini tercermin dari masih banyaknya unit usaha yang tidak terdata secara menyeluruh, terjadi duplikasi pencatatan, serta ketidakefektifan program dalam pengembangan sektor UMKM daerah (Yahya et al., 2025).

Kabupaten Batubara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menghadapi persoalan serupa dalam pengembangan sektor UMKM. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada jalur Kawasan Industri Strategis Nasional (KISN) sehingga secara potensi, Kabupaten Batubara memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor UMKM (Purba & Nuraini, 2024). Meskipun demikian, program pemberdayaan pemerintah terhadap sektor UMKM seperti pelatihan, bantuan peralatan, dan fasilitasi legalisasi usaha di wilayah ini pun cenderung bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, serta tidak didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang kontekstual terhadap sektor UMKM sehingga memunculkan kesenjangan struktural dalam pengembangan ekosistem UMKM lokal (Nustini et al., 2024).

Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan basis data UMKM yang komprehensif, akurat, dan terdesentralisasi sebagian besar disebabkan oleh pendekatan pembangunan yang masih bersifat top-down (Nasution et al., 2025). Pendekatan ini ditandai oleh pola kerja sektoral yang terfragmentasi, di mana masing-masing sektor bekerja secara terpisah tanpa koordinasi dengan lintas sektor maupun integrasi hasil kerja dengan aktor eksternal, khususnya kalangan akademisi (Kissinger et al., 2021). Akademisi memiliki peran strategis dalam menghasilkan kajian berbasis data empiris dan kontekstual berbasis pada kebutuhan dan permasalahan di lapangan (Sjögren Forss et al., 2021). Ketidakterlibatan akademisi dalam proses formulasi dan validasi data UMKM akan menyebabkan terputusnya mata rantai antara realitas empirik dan arah kebijakan yang relevan. Tanpa adanya sinkronisasi hasil kerja riset yang berbasis bukti dan menggambarkan kondisi riil UMKM di berbagai wilayah administratif, intervensi program sangat sulit melahirkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang benar-benar responsif, kontekstual, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mampu menjawab tantangan pembangunan sektoral dan spasial UMKM secara efektif (Widita et al., 2024).

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti isu-isu penting dalam pengembangan UMKM dari berbagai dimensi. Tambunan (2023) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan mendasar UMKM di Indonesia adalah ketimpangan antara jumlahnya yang besar dengan kontribusinya terhadap ekspor nasional yang sangat rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat legalitas dan orientasi pasar. Hapiz et al. (2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program strategis seperti UMKM Go Digital dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, hambatan struktural berupa ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan akses permodalan masih

menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan. Penelitian oleh [Kurniasari et al \(2024\)](#) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah terhadap UMKM seringkali tidak didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang berbasis data, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Penelitian [Winarsih et al. \(2022\)](#) menegaskan pentingnya legalitas formal sebagai prasyarat utama dalam akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas bisnis UMKM. [Aulia dan Sari \(2020\)](#) mengulas bagaimana struktur usaha yang dikelola secara informal dan kekeluargaan memiliki risiko keberlanjutan rendah, terutama dalam aspek regenerasi dan ekspansi usaha. [Rizal et al. \(2021\)](#) dalam studinya mengenai UMKM pesisir di Sumatera Barat menemukan keberagaman sistem pemasaran yang belum optimal karena minimnya penetrasi teknologi. [Arumaningtyas et al. \(2022\)](#) menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM desa dalam menerapkan *e-commerce*, seperti kendala konektivitas dan budaya bisnis tradisional. [Salim dan Wulandari \(2021\)](#) mengangkat kontribusi UMKM terhadap ketahanan ekonomi desa, tetapi menggarisbawahi bahwa kontribusi tersebut belum mendapat dukungan sistemik yang memadai. Terakhir, [Utami dan Prabowo \(2023\)](#) mengembangkan model intervensi berbasis indikator kesiapan digital, yang terbukti meningkatkan efektivitas pendampingan pemerintah dalam transformasi digital UMKM. Penelitian [Kurniawan dan Maulida \(2022\)](#) menunjukkan pentingnya klasifikasi UMKM berdasarkan indikator kewirausahaan dan legalitas dalam merancang strategi pemberdayaan yang tepat sasaran.

Berbagai studi terdahulu, menjelaskan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral dan fokus pada satu atau dua aspek UMKM, seperti digitalisasi, legalitas, atau manajerial. Belum banyak riset yang secara eksplisit mengkaji pemetaan profil UMKM secara komprehensif dan multidimensional dalam satu wilayah administratif tertentu. Dengan demikian, gap penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini adalah pentingnya penyusunan pemetaan profil UMKM berbasis wilayah (kecamatan) dengan pendekatan indikator majemuk yang mencakup aspek legalitas, struktur SDM, jenis usaha, sistem pemasaran, dan intervensi kebijakan. Melalui pendekatan berbasis wilayah dan indikator majemuk, pemetaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis terhadap kelemahan struktural UMKM, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam merancang kebijakan pemberdayaan sektor UMKM yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Metode

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai dinamika dan karakteristik UMKM di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pendekatan ini dinilai paling relevan mengingat kompleksitas fenomena yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan legalitas usaha, manajemen sumber daya manusia, serta pola pemasaran.

Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif eksploratif, dengan tujuan utama untuk memetakan kondisi faktual UMKM berdasarkan enam indikator utama:

1. Skala usaha,
2. Jenis usaha,
3. Legalitas formal,
4. Struktur sumber daya manusia (SDM),
5. Sistem pemasaran, dan
6. Bentuk intervensi atau dukungan lembaga.

Desain ini dirancang untuk mengidentifikasi tipologi UMKM dan menyusun strategi intervensi yang kontekstual dan aplikatif.

2.2. Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri atas 12 kecamatan: Air Putih, Medang Deras, Datuk Tanah Datar, Lima Puluh, Talawi, Laut Tador, Datuk Lima Puluh, Sei Balai, Lima Puluh Pesisir, Nibung Hangus, Sei Suka, dan Tanjung Tiram. Setiap kecamatan dijadikan unit analisis dengan mempertimbangkan sebaran spasial dan karakteristik sektoral UMKM, sehingga memungkinkan pemetaan yang representatif secara geografis dan ekonomi.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama:

1. Observasi langsung
Digunakan untuk memperoleh gambaran empiris tentang kondisi fisik tempat usaha, sarana produksi, dan pola operasional pelaku UMKM.

2. Wawancara semi-terstruktur
Dilakukan secara tatap muka dengan pelaku UMKM untuk menggali persepsi, tantangan manajerial, pengalaman terhadap intervensi kebijakan, dan strategi adaptasi terhadap dinamika pasar.
3. Kuesioner terstruktur
Disusun dalam format kombinasi antara pertanyaan tertutup dan terbuka, mencakup variabel-variabel utama dari indikator penelitian. Instrumen ini memungkinkan kuantifikasi temuan dan perbandingan antar-unit observasi.
4. Studi dokumentasi
Meliputi telaah terhadap dokumen sekunder dari Dinas Koperasi dan UKM, laporan pendataan UMKM tahun 2023, serta kebijakan/regulasi yang relevan pada tingkat daerah maupun nasional.

2.4. Teknik Penentuan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. UMKM telah beroperasi minimal selama 1 tahun secara aktif;
2. Mewakili berbagai sektor usaha (perdagangan, produksi, jasa, dll.);
3. Bersedia memberikan informasi terkait aspek manajerial, legalitas, digitalisasi, dan akses permodalan.

Total unit observasi yang dijadikan sampel berjumlah ± 100 UMKM, yang tersebar secara proporsional di seluruh kecamatan.

2.5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui pendekatan integratif yang mencakup langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data
Proses identifikasi dan penyaringan data lapangan untuk mengisolasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi Tematik
Data dikodekan dan dikelompokkan berdasarkan enam dimensi utama: skala usaha, jenis usaha, legalitas formal, struktur SDM, sistem pemasaran, dan bentuk intervensi lembaga.
3. Analisis Tipologi UMKM
Penyusunan matriks tipologi berdasarkan kombinasi kategori pada masing-masing dimensi. Matriks ini menjadi dasar pengklasifikasian UMKM ke dalam kelompok-kelompok strategis.
4. Perumusan Strategi Intervensi
Berdasarkan hasil klasifikasi, dirumuskan strategi penguatan berbasis tipologi, mencakup kebijakan kelembagaan, pelatihan, akses legalitas, dan fasilitasi pasar digital.

2.6. Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan peer review internal antar peneliti untuk mengevaluasi konsistensi analisis dan interpretasi data. Validasi lapangan secara berkala dilakukan untuk memastikan akurasi data dan kesesuaian dengan konteks lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Wilayah Pesisir Kabupaten Batubara

Kabupaten Batubara berada dalam wilayah pesisir yang unik, ditandai dengan keberagaman budaya, sumber daya alam laut yang melimpah, serta ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor-sektor tradisional. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir Batubara menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan perikanan, pertanian, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga. Kondisi ini membentuk struktur sosial ekonomi berbasis komunitas dengan sistem kerja informal dan hubungan sosial yang erat.

Secara demografis, wilayah pesisir Batubara dihuni oleh komunitas multietnis, termasuk suku Melayu, Batak, dan Jawa, yang berkontribusi pada kekayaan tradisi kuliner, kerajinan, dan jasa lokal yang menjadi basis banyak UMKM. Namun demikian, wilayah ini juga menghadapi tantangan serius berupa rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya infrastruktur penunjang ekonomi, dan minimnya akses terhadap layanan keuangan formal (Aisyah & Sontang, 2022). Kondisi sosial ekonomi ini menciptakan profil UMKM yang beragam. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah pesisir bergerak dalam sektor makanan olahan laut dan perdagangan hasil tangkapan.

3.2 Profil UMKM Berdasarkan Indikator Kunci

Bagian ini menyajikan hasil pemetaan dan analisis mendalam terhadap enam indikator kunci yang membentuk karakteristik UMKM di Kabupaten Batubara. Keenam indikator tersebut dipilih karena mewakili dimensi struktural dan fungsional yang menentukan keberlangsungan dan daya saing UMKM, yakni skala usaha, jenis usaha, legalitas formal, struktur sumber daya manusia (SDM), sistem pemasaran, serta intervensi pemerintah dan lembaga pendukung.

Pendekatan analisis dilakukan secara multidimensi, dengan menggabungkan data kuantitatif hasil survei di 12 kecamatan serta temuan kualitatif dari observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Setiap indikator dianalisis tidak hanya berdasarkan capaian numerik, tetapi juga keterkaitannya dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan geografis di Kabupaten Batubara.

Melalui pengelompokan indikator ini, dapat diidentifikasi pola dominasi dan tantangan khas yang dihadapi UMKM lokal. Pemahaman menyeluruh terhadap indikator-indikator ini penting sebagai landasan penyusunan kebijakan dan program penguatan UMKM yang lebih terarah dan kontekstual.

3.2.1. Skala Usaha

UMKM di Kabupaten Batubara mayoritas berada pada skala mikro, yang secara umum ditandai dengan omset tahunan di bawah Rp300 juta dan jumlah tenaga kerja antara 1 hingga 5 orang. Berdasarkan data lapangan, 65% UMKM diklasifikasikan sebagai usaha mikro, 30% sebagai usaha kecil, dan hanya 5% termasuk dalam kategori menengah. Dominasi usaha mikro ini mencerminkan struktur ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada kegiatan ekonomi rumah tangga.

Secara demografis, usaha mikro tersebar merata di seluruh kecamatan dengan konsentrasi tinggi di wilayah pesisir seperti Tanjung Tiram dan Talawi, di mana aktivitas ekonomi banyak bertumpu pada pengolahan hasil laut dan perdagangan kecil. Minimnya akses terhadap permodalan, teknologi, serta pasar yang lebih luas menjadi faktor yang menyebabkan sebagian besar pelaku usaha tetap berada dalam kategori mikro selama bertahun-tahun.

Analisis statistik juga menunjukkan korelasi antara skala usaha dan tingkat pendidikan pemilik. Mayoritas pelaku usaha mikro memiliki pendidikan terakhir tingkat sekolah menengah pertama atau dasar. Rendahnya kapasitas literasi keuangan dan manajerial menjadi penghambat dalam ekspansi usaha ke level kecil atau menengah. Di sisi lain, UMKM yang berada pada skala kecil dan menengah menunjukkan karakteristik yang berbeda: mereka umumnya telah memiliki aset tetap seperti lokasi usaha permanen, alat produksi modern (meskipun sederhana), serta segmentasi pasar yang lebih luas. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas karena transisi dari usaha mikro ke skala lebih besar membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk kebijakan fiskal, pembinaan kelembagaan, serta pendampingan teknis berkelanjutan.

Fenomena stagnasi pada skala mikro ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di Batubara saat ini lebih mencerminkan *survival economy* daripada *growth-oriented enterprise*. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di daerah ini harus diarahkan pada intervensi transformasional, seperti integrasi ke dalam rantai pasok formal, fasilitasi akses modal dan kemudahan legalisasi usaha melalui pemberian Nomor Izin Berusaha (NIB) bergulir dengan skema mikro adaptif, dan digitalisasi operasional yang dapat memperluas cakupan pasar secara signifikan.

3.2.2. Jenis Usaha

Jenis usaha yang berkembang di Kabupaten Batubara mencerminkan karakteristik geografis dan budaya lokal masyarakat. Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM, jenis usaha paling dominan adalah sektor makanan dan minuman (F&B), kerajinan tangan berbasis local budaya setempat, serta jasa informal seperti penjahit rumahan, jasa potong rambut, bengkel kecil, dan warung kelontong.

Sektor makanan dan minuman mendominasi karena kemudahan bahan baku lokal, terutama di wilayah pesisir yang kaya hasil laut. Produk olahan seperti kerupuk ikan, abon ikan, dan aneka makanan ringan tradisional menjadi andalan sebagian besar pelaku UMKM. Usaha ini didorong oleh budaya konsumsi masyarakat yang masih kuat terhadap produk lokal, serta nilai tambah yang dapat dihasilkan dari pengolahan bahan mentah menjadi produk siap konsumsi.

Kerajinan lokal seperti tikar pandan, anyaman bambu, dan souvenir berbasis budaya Melayu juga berkembang, meskipun skalanya masih terbatas. Pelaku usaha kerajinan sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luang dan bekerja secara kolektif dalam kelompok kecil berbasis desa.

Jenis usaha jasa informal seperti pangkas rambut, cucian motor, servis elektronik, dan warung kopi banyak ditemukan di kecamatan-kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih tinggi seperti Lima Puluh, Air Putih, dan Tanjung Tiram. Kegiatan jasa ini bersifat subsisten dan belum banyak terhubung dengan rantai pasok formal atau platform digital.

Dari sisi gender, jenis usaha F&B dan kerajinan lebih banyak digeluti oleh perempuan, sedangkan usaha jasa dan sektor konstruksi ringan lebih banyak dijalankan oleh laki-laki. Hal ini penting diperhatikan dalam perumusan program pemberdayaan berbasis gender.

Distribusi jenis usaha juga menunjukkan adanya pola spasial yang kuat di mana wilayah pesisir lebih condong pada pengolahan hasil laut dan kuliner, sementara daerah tengah dan pedalaman cenderung pada pertanian kecil dan jasa informal. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM perlu mempertimbangkan konteks geografis serta keunggulan komparatif lokal.

Kendati beragam, sebagian besar jenis usaha masih bersifat homogen dan memiliki daya saing rendah akibat keterbatasan inovasi produk, desain, dan branding. Kurangnya akses terhadap pelatihan diversifikasi produk dan inkubator bisnis menyebabkan stagnasi dalam pengembangan jenis usaha yang berbasis inovasi.

3.2.3. Legalitas Formal

Legalitas formal merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan UMKM karena berkaitan langsung dengan akses pasar yang lebih luas. Di Kabupaten Batubara, tingkat legalitas UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan data lapangan, hanya sekitar 36% pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 22% yang memiliki izin PIRT untuk produk makanan dan minuman, dan kurang dari 10% yang telah memperoleh sertifikasi halal dari lembaga berwenang.

Faktor utama rendahnya tingkat legalitas ini adalah minimnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur administratif yang dianggap rumit. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa legalitas hanya relevan bagi usaha besar atau yang sudah memiliki akses pasar nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pendampingan hukum dan administrasi dari instansi terkait di tingkat kecamatan dan desa dibuktikan dengan ada sekitar 25.23% pelaku UMKM mengaku kurang mendapatkan informasi dan pemahaman terkait pengurusan legalitas usahanya. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis, seperti, kesulitan dalam akses ke dalam sistem daring, adanya biaya dalam mengurus izin, jarak lokasi pengurusan yang terlalu jauh, dan adanya syarat administratif lainnya yang membuat pelaku UMKM merasa takut untuk mendaftarkan pengajuan izin usaha. Akibatnya, sebagian besar pelaku UMKM hanya mengandalkan legalitas informal, seperti surat keterangan usaha dari kepala desa atau kelurahan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses pembiayaan, terutama dari lembaga perbankan dan koperasi resmi, karena legalitas formal menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) dan program bantuan lainnya. Tidak hanya itu, tanpa legalitas formal seperti NIB, produk UMKM juga sulit untuk menembus pasar retail modern atau mengikuti pameran resmi berskala nasional.

Upaya pemerintah dalam memberikan legalisasi usaha seringkali bersifat sporadis dan proyek berbasis program jangka pendek. Untuk itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, seperti penyediaan layanan bantuan hukum gratis, digitalisasi proses perizinan, dan pelatihan terpadu mengenai pentingnya legalitas bagi keberlanjutan usaha.

Legalitas usaha, khususnya dalam pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki keterkaitan yang erat dengan semua elemen dalam pengembangan UMKM. Rendahnya tingkat legalisasi usaha menyebabkan UMKM kesulitan dalam mengakses fasilitas pembiayaan, pasar yang lebih luas, dan program pemerintah yang mendukung. Tanpa NIB, UMKM sering kali terjebak dalam skala mikro karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal atau mengakses pasar formal. Hal ini juga menghambat mereka dalam mengembangkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan bertransformasi menjadi usaha kecil atau menengah. Dengan adanya legalitas melalui pemberian NIB, UMKM akan memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber daya, seperti permodalan, pelatihan, dan jaringan pasar yang lebih luas. Proses legalisasi ini memungkinkan UMKM untuk memperoleh fasilitas yang dapat mendukung ekspansi usaha, seperti pembiayaan formal dari perbankan atau kemudahan dalam mengikuti program-program pemerintah yang berbasis data. Oleh karena itu, peningkatan legalitas usaha menjadi langkah penting untuk mendorong UMKM naik kelas dari usaha mikro menuju usaha kecil atau menengah yang lebih berkembang dan berdaya. Pemerintah daerah dapat menggandeng perguruan tinggi, LSM, dan organisasi profesi untuk membentuk Klinik Legalitas UMKM di setiap kecamatan yang berfungsi sebagai pusat layanan dan pendampingan administratif. Selain itu, insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau kemudahan akses pasar bagi UMKM yang telah memiliki legalitas formal juga dapat mendorong peningkatan jumlah usaha yang terdaftar secara resmi. Dengan demikian, upaya peningkatan legalitas formal UMKM di Kabupaten Batubara harus diposisikan sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Tabel 1. Permasalahan Perizinan Usaha

No.	Kategori Kendala Perizinan Usaha	Persentase (%)	Frekuensi
-----	----------------------------------	----------------	-----------

1	Kurangnya informasi dan pemahaman (syarat, alur, jenis izin, OSS, dll.)	25.23%	27
2	Prosedur perizinan rumit dan membingungkan	13.08%	14
3	Kendala teknis dan akses OSS / sistem online	10.28%	11
4	Biaya tinggi dan keterbatasan modal	9.35%	10
5	Kekurangan dokumen pendukung atau data tidak sesuai	8.41%	9
6	Jarak/lokasi pelayanan perizinan terlalu jauh	4.67%	5
7	Ketergantungan pada pihak luar (RT/RW, dinas, instansi lain)	6.54%	7
8	Minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah	7.48%	8
9	Rasa takut, ragu, atau tidak termotivasi	6.54%	7
10	Perbedaan atau perubahan regulasi antar wilayah / dinas	4.67%	5
11	Tidak punya waktu karena sibuk usaha	3.74%	4
12	Lain-lain (unik, tidak bisa dikategorikan jelas)	0.93%	1
Total		100.0%	107

3.2.4 Struktur SDM

Struktur sumber daya manusia (SDM) UMKM di Kabupaten Batubara menunjukkan bahwa sekitar 70% usaha dikelola berbasis keluarga. Pengelolaan berbasis keluarga ini ditandai dengan pembagian peran yang informal, di mana pemilik usaha merangkap sebagai operator, manajer, sekaligus tenaga produksi. Anggota keluarga lain biasanya dilibatkan tanpa kontrak kerja formal, dan sistem upah pun umumnya tidak mengacu pada standar ketenagakerjaan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% UMKM yang memiliki struktur organisasi sederhana, seperti adanya pencatatan keuangan terpisah, pembagian tugas antara produksi dan pemasaran, atau penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga. Ini menandakan bahwa mayoritas UMKM belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk tumbuh secara berkelanjutan atau bertransformasi menjadi usaha skala lebih besar.

Faktor yang memengaruhi rendahnya strukturisasi SDM ini antara lain adalah tingkat pendidikan pemilik usaha yang sebagian besar berada di jenjang pendidikan dasar atau menengah pertama, keterbatasan akses terhadap pelatihan manajerial, serta budaya kerja yang masih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan keluarga. Ketiadaan struktur SDM yang profesional berdampak langsung pada lemahnya tata kelola usaha, minimnya inovasi, serta kesulitan dalam menerapkan sistem pencatatan, manajemen stok, dan evaluasi kinerja. Hal ini juga menyulitkan UMKM untuk mengakses program pelatihan dari pemerintah atau lembaga swasta, karena banyak pelaku usaha tidak mampu memenuhi prasyarat administratif atau teknis.

Dari aspek gender, ditemukan bahwa sebagian besar usaha yang dikelola perempuan memiliki ciri khas kerja kolektif berbasis rumah tangga, namun cenderung kurang mendapat pengakuan formal sebagai tenaga kerja. Fenomena ini penting untuk dicermati dalam perumusan kebijakan pemberdayaan SDM yang inklusif dan sensitif gender.

Upaya penguatan struktur SDM di UMKM Batubara memerlukan pendekatan bertahap, dimulai dari edukasi tentang pentingnya struktur organisasi dasar, pelatihan manajerial berbasis komunitas, hingga fasilitasi rekrutmen tenaga kerja profesional melalui program magang, kerja sama dengan SMK/Politeknik lokal, atau relawan bisnis. Intervensi yang bersifat jangka panjang seperti pembentukan koperasi berbasis sektor usaha atau inkubator bisnis desa juga dapat menjadi sarana kolektif untuk mengatasi kendala struktural ini. Dengan SDM yang lebih terstruktur dan terlatih, UMKM akan lebih siap menghadapi tantangan pasar modern dan integrasi ekonomi digital.

3.2.5 Sistem Pemasaran

Sistem pemasaran UMKM di Kabupaten Batubara pada umumnya masih berada pada level konvensional. Sekitar 70% pelaku UMKM masih mengandalkan metode tatap muka, seperti penjualan langsung di rumah, pasar tradisional, atau melalui jaringan sosial informal (teman, keluarga, tetangga). Pemasaran dilakukan secara pasif, tanpa strategi promosi yang terstruktur.

Sebagian kecil, sekitar 20%, telah memasuki tahap pemasaran semi-digital, seperti menggunakan aplikasi pesan instan (WhatsApp, Facebook Messenger) untuk menerima pesanan, atau memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram tanpa strategi konten yang konsisten. Hanya kurang dari 10% UMKM yang menunjukkan karakteristik pemasaran digital adaptif, yaitu penggunaan platform e-commerce (Shopee, Tokopedia), promosi melalui iklan berbayar, dan penggunaan aplikasi kasir digital.

Keterbatasan literasi digital, biaya perangkat, dan kurangnya pelatihan menjadi kendala utama dalam transformasi pemasaran ini. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki perangkat memadai (smartphone, akses

internet stabil), dan belum memahami pentingnya pemasaran digital sebagai alat ekspansi pasar dan daya saing. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki identitas visual usaha yang kuat, seperti logo, kemasan menarik, atau narasi produk. Hal ini menjadikan produk UMKM kurang menonjol dan sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Di sisi lain, strategi pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth) masih menjadi kekuatan tersendiri dalam jaringan sosial komunitas lokal.

Potensi pemasaran digital sebenarnya cukup besar, mengingat UMKM di Batubara memiliki produk berbasis lokalitas yang unik. Namun, tanpa pendampingan sistematis, potensi ini belum tergarap optimal. Perlu adanya integrasi pelatihan digital marketing yang berbasis praktik, inkubasi UMKM digital, serta kolaborasi dengan komunitas konten kreator lokal dan influencer mikro.

Model pemasaran kolektif berbasis desa atau kluster usaha juga dapat menjadi strategi transisional. Misalnya, dengan membangun katalog digital bersama, akun media sosial komunitas, atau marketplace lokal. Pemerintah daerah, dinas terkait, dan mitra swasta perlu menjadi fasilitator dalam penyediaan pelatihan, infrastruktur digital, dan bantuan promosi terintegrasi.

Dengan transformasi pemasaran dari sistem konvensional menuju digital adaptif, UMKM di Batubara dapat meningkatkan jangkauan pasar, memperkuat merek lokal, serta memperluas akses ke pasar regional dan nasional secara lebih kompetitif.



Gambar 1. Sebaran Strategi Promosi yang Digunakan

3.2.6 Intervensi Pemerintah dan Lembaga

Intervensi pemerintah dan lembaga non-pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Batubara masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hanya sekitar 35% pelaku UMKM yang pernah menerima bentuk intervensi langsung, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan peralatan, maupun fasilitasi promosi.

Program-program bantuan yang diberikan sebagian besar bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing pelaku usaha. Misalnya, pelatihan kewirausahaan sering kali tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan peserta atau jenis usaha yang mereka jalankan, sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

Sebagian pelaku UMKM juga mengungkapkan bahwa distribusi bantuan tidak merata dan cenderung berpola politis atau tersentralisasi pada wilayah tertentu. Hal ini menciptakan kesenjangan antar pelaku usaha, khususnya antara UMKM di wilayah pesisir yang lebih terhubung dengan jaringan dinas, dan mereka yang berada di pedalaman atau daerah jauh dari pusat kota.

Selain dari pemerintah daerah, beberapa lembaga seperti koperasi, LSM lokal, telah melakukan kegiatan pendampingan. Namun keterlibatan mereka masih terbatas dalam ruang lingkup dan durasi, serta tidak diintegrasikan dalam sistem monitoring dan evaluasi daerah. Ini membuat dampak program sulit untuk diukur dan direplikasi. Kurangnya peta jalan intervensi UMKM secara spasial dan sektoral juga menjadi penghambat efektivitas intervensi. Belum ada basis data UMKM yang terintegrasi secara digital yang dapat digunakan untuk perencanaan program berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Tanpa hal ini, intervensi cenderung bersifat formalitas dan tidak berdampak.

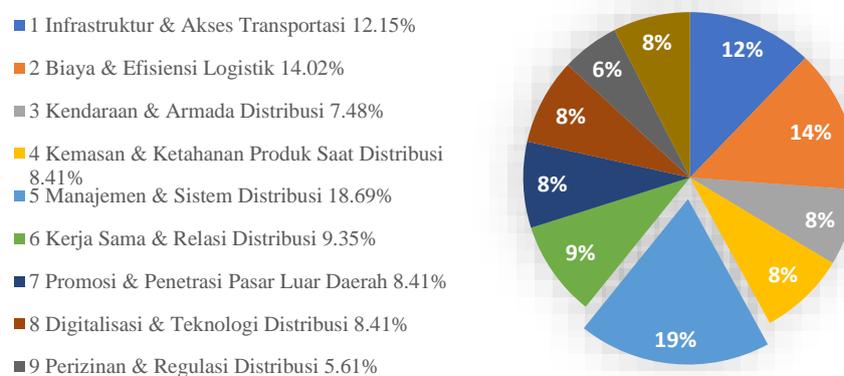
Dalam merepons hal ini, diharapkan ke depan, diperlukan pendekatan kolaboratif yang memperkuat peran pemerintah daerah sebagai koordinator intervensi lintas sektor. Pemerintah perlu membentuk ekosistem

dukungan berbasis data, dengan sistem informasi UMKM terintegrasi yang mencatat jenis usaha, skala, legalitas, kebutuhan pelatihan, dan histori bantuan. Program intervensi juga sebaiknya didesain secara tematik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM sasaran (Tambusay & Aisyah, 2024). Hal ini bisa dilakukan dengan, program transformasi digital untuk UMKM yang memiliki struktur SDM yang cakap sehingga UMKM inilah yang akan menjadi role model bagi UMKM lainnya. UMKM lain yang sudah berhasil dapat melakukan pengimbasan kepada UMKM lain. Selain itu, penting untuk membangun skema insentif bagi mitra swasta, BUMDes, yang bersedia berkontribusi dalam penguatan UMKM melalui model kemitraan berkelanjutan. Dengan intervensi yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis data, UMKM di Batubara tidak hanya akan bertahan tetapi juga berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan global dan era ekonomi digital.

3.3 Permasalahan Struktural UMKM

Permasalahan struktural menjadi akar dari berbagai tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Batubara. Berdasarkan data survei yang telah dianalisis, ditemui bahwa masalah utama UMKM lebih bersifat teknis dan merupakan refleksi dari keterbatasan aspek infrastruktur, manajemen, regulasi, hingga adaptasi teknologi. Salah satu temuan utama adalah lemahnya manajemen dan sistem distribusi yang tercatat sebagai tantangan paling signifikan dengan proporsi 18,69%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki perencanaan logistik yang efektif, belum mampu mengelola rantai pasok dengan efisien, dan cenderung melakukan distribusi secara reaktif daripada strategis.

Biaya logistik yang tinggi (14,02%) dan keterbatasan infrastruktur serta akses transportasi (12,15%) turut memperparah ketidakefisienan distribusi produk UMKM. Masalah ini dapat ditemui terutama di wilayah pesisir dan pedalaman yang memiliki keterbatasan jaringan jalan dan akses distribusi ke pasar luar daerah. Selain itu, perizinan dan regulasi distribusi (5,61%) masih menjadi kendala yang menghambat integrasi UMKM ke dalam pasar formal. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami dan belum mampu memenuhi ketentuan distribusi antar wilayah atau ekspor domestik. Kemasan dan ketahanan produk selama distribusi (8,41%) juga masih menjadi kelemahan. Produk olahan UMKM, terutama makanan dan hasil laut, banyak yang belum memenuhi standar pengemasan yang tahan terhadap perjalanan jarak jauh. Ini berdampak langsung pada kualitas dan persepsi konsumen terhadap produk lokal. Keterbatasan teknologi distribusi dan digitalisasi (8,41%) menjadi tantangan struktural lainnya. Kurangnya adopsi teknologi logistik seperti sistem pelacakan, aplikasi marketplace terintegrasi, serta manajemen inventori digital menunjukkan masih jauhnya UMKM dari era 4.0. Hal ini juga menghambat kemampuan pelaku usaha untuk bersaing dengan produk dari luar daerah. Selain tantangan-tantangan tersebut, aspek kerja sama dan relasi distribusi (9,35%), serta promosi dan penetrasi pasar luar daerah (8,41%) masih terbatas pada pendekatan konvensional. UMKM umumnya belum membangun jaringan kemitraan strategis dengan distributor, koperasi, atau pelaku usaha besar yang dapat membuka akses pasar yang lebih luas. Kombinasi dari berbagai faktor ini menggambarkan bahwa permasalahan UMKM bersifat multidimensi dan saling terkait. Tanpa solusi struktural yang terintegrasi dan berbasis data, intervensi yang dilakukan akan bersifat tambal sulam dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sistemik melalui penguatan ekosistem distribusi, pengembangan platform logistik kolektif, serta edukasi digital yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan daya saing produk lokal.



Gambar 2. Frekuensi permasalahan yang paling banyak muncul

3.4 Potensi UMKM dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi

Sektor UMKM di Kabupaten Batubara menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal, meskipun sebagian besar masih berada pada skala mikro dan beroperasi secara informal. Berdasarkan hasil survei terhadap 107 pelaku UMKM di wilayah ini, ditemui terdapat lima potensi utama yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat posisi UMKM sebagai pilar kemandirian ekonomi. Potensi-potensi tersebut mencerminkan peran strategis UMKM dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal.

1. UMKM sebagai Pilar Ekonomi Berbasis Komunitas

Sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Batubara (54%) menjalankan usahanya dari rumah, menjadikan model usaha ini tidak hanya sebagai unit ekonomi produktif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mendukung keberlangsungan rumah tangga. Keberadaan UMKM dengan model ini mencerminkan prinsip *community-based economy*, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam ekonomi lokal serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Namun, meskipun model rumah tangga memberikan fleksibilitas dan kemandirian bagi pelaku usaha, ia juga menghadirkan tantangan terkait dengan tata ruang, sanitasi, dan efisiensi produksi. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas UMKM melalui program edukasi lingkungan dan pengelolaan limbah usaha, serta pemberian insentif untuk pemisahan ruang usaha dari aktivitas rumah tangga, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, sertifikasi halal atau standar kualitas produk juga penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

2. Potensi Inovasi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular

Sebanyak 72% pelaku UMKM di Batubara melaporkan bahwa limbah produksi mereka dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai tambah, seperti pupuk kompos, kerajinan tangan, atau bahan bangunan alternatif. Potensi ini menunjukkan kesiapan pelaku usaha untuk terlibat dalam praktik ekonomi sirkular yang berbasis pada pemanfaatan ulang limbah (*circular economy*). UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi tradisional, tetapi juga sebagai agen transformasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan (UNEP, 2021). Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasi ekonomi sirkular adalah keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat literasi teknis pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk mewujudkan potensi ini, perlu adanya dukungan dalam bentuk pelatihan mengenai desain produk berbasis limbah, pengembangan teknologi tepat guna, serta inkubasi produk yang dapat memanfaatkan bahan-bahan sisa produksi. Pendekatan ini akan memperkuat posisi UMKM sebagai pelaku ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Kesiapan Menuju Digitalisasi dan Ekspansi Pasar

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa UMKM di Batubara sudah mulai mengadopsi digitalisasi dalam pemasaran produk mereka, dengan 21,5% pelaku usaha menggunakan media sosial dan 15% menggunakan marketplace digital. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan konten digital, manajemen pesanan daring, dan pelayanan pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran untuk beradaptasi dengan perkembangan digital, UMKM masih menghadapi hambatan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Oleh karena itu, pelatihan pemasaran digital berbasis lokal dan peningkatan kapasitas dalam mengelola platform digital perlu menjadi prioritas dalam mendukung transisi UMKM menuju ekosistem ekonomi digital. Selain itu, pengembangan program literasi digital yang terjangkau dan terstandar sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan saluran pemasaran digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka di tingkat nasional maupun internasional (KemenkopUKM, 2023).

4. Independensi Finansial melalui Modal Sosial

Sebanyak 22,43% pelaku UMKM di Kabupaten Batubara mengandalkan dana pribadi dan keluarga sebagai sumber modal, sementara 15,89% lainnya memperoleh dana dari pinjaman komunitas lokal. Meskipun model pembiayaan ini menunjukkan adanya kemandirian finansial, ketergantungan pada sumber pembiayaan informal juga mencerminkan adanya kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam jangka pendek, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan koperasi berbasis komunitas atau kelompok solidaritas mikro kredit yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Namun, untuk mendukung ekspansi usaha dan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang, perluasan akses terhadap pembiayaan formal yang lebih inklusif sangat diperlukan. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster yang lebih terfokus pada UMKM lokal akan memfasilitasi pertumbuhan sektor ini dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih pesat.

5. Orientasi Ekspansi dan Penguatan Ekosistem Usaha

Beberapa pelaku UMKM di Batubara telah menunjukkan inisiatif untuk memperluas usaha mereka, seperti menjalin kerja sama dengan toko besar (7,48%), mengikuti pelatihan ekspor (6,54%), serta memperluas pasar ke luar daerah (4,67%). Inisiatif ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya integrasi dalam rantai nilai yang lebih besar, serta peluang untuk memperluas pasar. Meskipun demikian, untuk merealisasikan potensi ini secara maksimal, diperlukan adanya pemetaan profil usaha yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi. Tanpa basis data lokal yang kuat, potensi ekspansi ini akan tetap terhambat dan sulit dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem usaha yang mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal harus menjadi prioritas dalam memperkuat kapasitas UMKM untuk bersaing dalam skala yang lebih luas.

Kelima potensi utama yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Batubara memiliki dasar yang kuat untuk menjadi pilar ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan intervensi yang komprehensif dalam hal penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas manajerial, akses terhadap pembiayaan formal, serta integrasi digitalisasi dalam system pemasaran produk. Upaya pengembangan ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak terkait untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan dan inklusif.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM di Kabupaten Batubara memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian lokal, mereka masih terhambat oleh kendala struktural yang dapat mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha. Mayoritas UMKM berada pada skala mikro, dengan keterbatasan akses permodalan, pemasaran, dan digitalisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi solusi untuk mendorong transisi menuju skala usaha yang lebih besar dan berkelanjutan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh mayoritas UMKM adalah rendahnya tingkat legalitas usaha yang membatasi akses terhadap pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin resmi dan tidak menyadari pentingnya legalitas bagi kelangsungan bisnis.

Sistem pemasaran UMKM masih mengandalkan metode konvensional, dengan penggunaan media sosial terbatas pada platform dasar. Potensi transformasi digital sangat besar, dan dengan pendampingan yang tepat, teknologi digital dapat memperluas pasar, memperkuat branding, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, struktur SDM yang berbasis keluarga tanpa keahlian manajerial yang memadai juga membatasi inovasi dan efisiensi operasional. Di sisi lain, intervensi pemerintah masih kurang terkoordinasi dan tidak berbasis data spasial serta sektoral yang komprehensif, yang mengurangi dampak kebijakan terhadap pengembangan UMKM.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti percepatan legalisasi usaha melalui pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB), dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha. Transformasi sistem pemasaran digital harus menjadi prioritas utama, dengan pelatihan pemasaran digital, penyediaan infrastruktur digital yang lebih baik, serta pengembangan sistem pemasaran berbasis kolaborasi antar pelaku usaha. Penguatan SDM melalui pelatihan manajerial berbasis komunitas akan meningkatkan kapasitas operasional dan daya saing UMKM. Kebijakan pemerintah perlu berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi, dengan pemetaan kondisi dan kebutuhan sektor UMKM secara komprehensif.

Studi ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan pengembangan UMKM yang lebih terstruktur dan berbasis bukti. Peningkatan kapasitas UMKM akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan mempersiapkan UMKM untuk bersaing di pasar global, sambil memanfaatkan potensi kearifan lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sektor ini.

Referensi

- Aisyah, D., & Sontang, M. (2022). Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 8(1), 59–74.
- Arumaningtyas, N., Noviani, L., & Harini, H. (2022). Pengaruh Pemanfaatan E-Commerce dan Locus of Control terhadap Kinerja Usaha Mahasiswa Pelaku Bisnis Online. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi*,

- Manajemen Dan Keuangan*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v6n2.p101-112>
- Bhakti, U. P. (2025). Faktor Kinerja UMKM : Analisis Efek Mediasi Dukungan Pemerintah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 685–698. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i2.898> Faktor
- Diwayana Putri Nasution, Hilmi, Rizki Ramadhan, Feri Susilawati, Rachmad Ikhsan, Lia Nazliana Nasution, W. I. S. (2025). UTILIZATION OF DIGITALIZATION FOR MSME DEVELOPMENT AS A PILLAR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 3(01), 371–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i1.467>
- Hapiz, M., Septia, L. P., Aprilianti, D., Aprilianto, D., & Maulida, I. (2025). Analisis Kebijakan Pengembangan UMKM Digital di Indonesia : Tantangan dan Peluang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 36–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15538100> Analisis
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Kissinger, G., Brockhaus, M., & Bush, S. R. (2021). Policy integration as a means to address policy fragmentation: Assessing the role of Vietnam’s national REDD+ action plan in the central highlands. *Environmental Science and Policy*, 119(October 2020), 85–92. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.02.011>
- Kurniasari, I., Maghfiroh, R. D., Nugroho, D., & Seputro, D. (2024). Peningkatan Kapabilitas UMKM Kuliner Kota Malang melalui Pelatihan Keuangan Bisnis. *Asthadarma Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 64–72.
- Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 50. <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>
- Nustini, Y., Arwani, A., Budiana, E., Maidani, Wahyundaru, S. D., & Putra, R. A. (2024). CSR Strategies and Guidelines for MSMEs: A Review of Micro, Small, and Medium Enterprises’ Sustainable CSR Practices. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(4), 620–637.
- Purba, B. M., & Nuraini, C. (2024). Integrated Area Development as A Sectoral and Regional Development Model (Kuala Tanjung Industrial and Port Area). *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7), 3159–3176. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i7.10219>
- Reza Juanda, Mity Risky, & Rico Nur Ilham. (2023). the Influence of Growth of Micro Small and Medium Enterprises (Ukm) and Unemployment on Growth Indonesian Economy. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEAS)*, 3(1), 188–202. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i1.675>
- Sjögren Forss, K., Kottorp, A., & Rämgård, M. (2021). Collaborating in a penta-helix structure within a community based participatory research programme: ‘Wrestling with hierarchies and getting caught in isolated downpipes.’ *Archives of Public Health*, 79(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13690-021-00544-0>
- Tambunan, T. S. (2023). Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 77–88. <https://doi.org/10.51622/jbm.v1i2.1990>
- Tambusay, M. D. E., & Aisyah, D. (2024). Diagnosing Organizational Accountability for Inclusive Public Service (A Case Study Using the Burke – Litwin Transformational Framework). *Journal of Public Administration Studies*, 9(2), 35–43.
- Utami, E. Y., Lubis, A. F., & Ramadhani, H. (2024). The Effect of Regulatory Environment, External Financing, and Business Networks on MSME Growth in West Java. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(3), 355–365.
- Widita, A. A., Lechner, A. M., & Widyastuti, D. T. (2024). Spatial patterns and drivers of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) within and across Indonesian cities: Evidence from highly granular data. *Regional Science Policy and Practice*, 16(11), 100137. <https://doi.org/10.1016/j.rssp.2024.100137>
- Yahya, A., Permana, I., Andriyani, M., Zhafira, N., & Tsabita, S. (2025). Pengembangan UMKM melalui Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 189–195.